

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka BPKAD Kabupaten Asmat sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah rencana kerja tahunan (Renja) OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis OPD. RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA OPD Tahun 2019 BPKAD Kabupaten Asmat dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui

sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renja – OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja – OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja - OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja - OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan sehingga Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun Anggaran 2019 lebih konkrit dan terukur.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

3. Penyusunan rencana kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS Tahun 2019 yang memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Asmat Tahun 2019 didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5556), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208) ;
29. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198) ;
30. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42) ;
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 ;
32. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua ;
33. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional;
36. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525) ;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) ;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
41. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah kabupaten Asmat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
45. Peraturan Bupati Asmat Nomor 35A Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja – OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2019 adalah :

1. Memberikan informasi tentang rencana program dan kegiatan tahunan.

2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.
3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 2019.

Sementara tujuan disusunnya Renja – OPD adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Menjadikan pedoman program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang direncanakan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada lingkup BPKAD Kabupaten Asmat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2019, meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Tahun 2019 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021 dan tahun ketiga pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2017

Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2017, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Asmat memperoleh alokasi dana APBD sebesar Rp. 366.694.382.473,- yang terbagi dalam kelompok Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	346.380.273.776,-
Belanja Pegawai	Rp.	15.665.076.193,-
Belanja Subsidi	Rp.	2.700.400.000,-
Belanja Hibah	Rp.	27.119.796.000,-
Belanja Bantuan Sosial	Rp.	48.638.912.825,-
Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintahan	Rp.	250.756.088.758,-
Belanja tidak terduga	Rp.	1.500.000.000,-
b. Belanja Langsung	Rp.	20.314.108.697,-
Belanja Pegawai	Rp.	3.955.600.000,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	16.166.078.697,-
Belanja Modal	Rp.	192.430.000,-

Sedangkan komponen Belanja Langsung berbentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga anggaran tersebut diupayakan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang

diemban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Bupati Asmat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Asmat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Unit Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asmat.

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2017, dari anggaran sebesar Rp. 366.694.382.473,- terealisasi sebesar Rp. 320.930.967.068,- atau 87,52 % dari anggaran yang ada. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2017

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1.20.05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A	366,694,382,473.00	320,930,967,068.00	45,763,415,405.00	87.52
1.20.1.20.05.TL	BELANJA TIDAK LANGSUNG	346,380,273,776.00	303,442,652,252.00	42,937,621,524.00	87.60
1.20.1.20.05	BELANJA LANGSUNG	20,314,108,697.00	15,488,314,816.00	4,825,793,881.00	76.24
1.20.1.20.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5,261,230,646.00	4,413,269,642.00	847,961,004.00	83.88
1.20.1.20.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	172,000,000.00	135,793,000.00	36,207,000.00	78.95
1.20.1.20.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158,077,500.00	123,221,157.00	34,856,343.00	77.95
1.20.1.20.05.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	320,000,000.00	165,837,688.00	154,162,312.00	51.82
1.20.1.20.05.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2,056,550,000.00	1,767,952,672.00	288,597,328.00	85.97
1.20.1.20.05.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	464,380,800.00	337,299,602.00	127,081,198.00	72.63
1.20.1.20.05.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	380,280,346.00	380,181,154.00	99,192.00	99.97

RENCANA KERJA OPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2019

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1.20.1.20.05.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000.00	8,000,000.00	12,000,000.00	40.00
1.20.1.20.05.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126,990,000.00	126,775,000.00	215,000.00	99.83
1.20.1.20.05.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	392,215,000.00	378,877,224.00	13,337,776.00	96.60
1.20.1.20.05.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1,170,737,000.00	989,332,145.00	181,404,855.00	84.51
1.20.1.20.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	261,430,000.00	223,999,274.00	37,430,726.00	85.68
1.20.1.20.05.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	64,000,000.00	63,840,000.00	160,000.00	99.75
1.20.1.20.05.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	52,430,000.00	52,213,500.00	216,500.00	99.59
1.20.1.20.05.02.26	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	130,000,000.00	92,964,654.00	37,035,346.00	71.51
1.20.1.20.05.02.28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	15,000,000.00	14,981,120.00	18,880.00	99.87
1.20.1.20.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	51,000,000.00	37,982,500.00	13,017,500.00	74.48
1.20.1.20.05.06.04	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	51,000,000.00	37,982,500.00	13,017,500.00	74.48
1.20.1.20.05.10	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	207,256,945.00	31,200,000.00	176,056,945.00	15.05
1.20.1.20.05.10.20	Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah dan Pembuatan Daftar Tunggal Serta Pendistribusian Laporan Terhadap OPD Terkait	81,452,760.00	31,200,000.00	50,252,760.00	38.30
1.20.1.20.05.10.23	PEMETAAN DAN PENDATAAN PBB OLEH KP PBB DAN BPKAD KABUPATEN ASMAT DI 1 DISTRIK (AGATS)	125,804,185.00	-	125,804,185.00	0.00

RENCANA KERJA OPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2019

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1.20.1.20.05.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14,533,191,106.00	10,781,863,400.00	3,751,327,706.00	74.19
1.20.1.20.05.17.01	PENGEMBANGAN SISTEM (SOFTWARE) PBB - P2 BERBASIS SISIOP PADA BPKAD KABUPATEN ASMAT TAHUN ANGGARAN 2017	353,900,000.00	326,634,500.00	27,265,500.00	92.30
1.20.1.20.05.17.02	Penyusunan Standar Satuan Harga Tahun 2018	705,442,000.00	400,000,000.00	305,442,000.00	56.70
1.20.1.20.05.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1,434,616,000.00	1,106,158,760.00	328,457,240.00	77.10
1.20.1.20.05.17.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Perubahan APBD	776,635,000.00	608,354,715.00	168,280,285.00	78.33
1.20.1.20.05.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	1,016,465,750.00	904,953,840.00	111,511,910.00	89.03
1.20.1.20.05.17.14	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati APBD Tahun Selanjutnya	1,137,399,000.00	894,188,881.00	243,210,119.00	78.62
1.20.1.20.05.17.18	PENDAMPINGAN PENYUSUNAN INVENSTARISASI ASSET DAN PEMELIHARAAN HARDWARE PADA BPKAD TAHUN 2017	500,000,000.00	482,790,000.00	17,210,000.00	96.56
1.20.1.20.05.17.31	PELELANGAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ASMAT	251,338,000.00	12,963,300.00	238,374,700.00	5.16
1.20.1.20.05.17.34	SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (UNDANG - UNDANG, PERPRES DAN PERMEN)	2,939,560,056.00	1,692,695,455.00	1,246,864,601.00	57.58
1.20.1.20.05.17.39	Pendataan Aset di Kab. Asmat, Merauke, Timika, Jayapura dan Luar Provinsi Papua	886,965,000.00	569,177,000.00	317,788,000.00	64.17

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1.20.1.20.05.17.55	PENDAFTARAN DAN PENDATAAN SUBYEK/OBYEK OBYEK PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENERBITAN PENYAMPAIAN SKPD DAN SKRD DI 15 DISTRIK DAN PENAGIHAN (TERPADU)	818,328,300.00	594,768,749.00	223,559,551.00	72.68
1.20.1.20.05.17.57	Penyortiran dan Penyampaian SPPT PBB serta Monitoring Penyampaian SPPT PBB	583,042,000.00	178,475,000.00	404,567,000.00	30.61
1.20.1.20.05.17.59	PENGADAAN, PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH	123,950,000.00	123,344,000.00	606,000.00	99.51
1.20.1.20.05.17.61	PENDAMPINGAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM (SIMAKDA), SIMKASDA DAN SIMGAJI PADA BPKAD KAB ASMAT	3,005,550,000.00	2,887,359,200.00	118,190,800.00	96.07

Sementara itu, salah satu urusan lain dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah mengelola pendapatan daerah. Adapun target pendapatan daerah tersebut sebesar Rp. 1.503.238.418.337,- yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 47.040.664.048,- Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.077.883.820.000,00,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 86.313.199.289,- Realisasi Pendapatan sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai Rp. 1.471.032.512.077,16,- atau sebesar 97,86%.

Untuk lebih lengkap realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017 dapat disajikan pada data sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017

Uraian	Indeks CALK	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Bertambah / Berkurang Rp.	%
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	5.1.1	1.503.238.418.337,00	1.471.032.512.077,16	(32.205.906.259,84)	97,86
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	47.040.664.048,00	37.418.942.792,16	(9.621.721.255,84)	79,55
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	895.784.000,00	1.696.266.749,00	800.482.749,00	189,36
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	7.642.502.000,00	7.724.339.528,00	81.837.528,00	101,07
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	7.181.492.131,00	-	(7.181.492.131,00)	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	31.320.885.917,00	27.998.336.515,16	(3.322.549.401,84)	89,39
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		47.040.664.048,00	37.418.942.792,16	(9.621.721.255,84)	79,55
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.447.842.454.289,00	1.433.093.704.364,00	(14.748.749.925,00)	98,98
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1	1.077.883.820.000,00	1.058.787.297.771,00	(19.096.522.229,00)	98,23
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	17.511.767.000,00	15.582.304.187,00	(1.929.462.813,00)	88,98
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	20.164.561.000,00	10.595.941.451,00	(9.568.619.549,00)	52,55
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	895.049.949.000,00	898.025.345.000,00	2.975.396.000,00	100,33
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	145.157.543.000,00	134.583.707.133,00	(10.573.835.867,00)	92,72
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.077.883.820.000,00	1.058.787.297.771,00	(19.096.522.229,00)	98,23
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	5.1.1.2.2	292.000.735.000,00	292.000.735.002,00	292.000.735.002,00	100,00
Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.2.2	105.686.147.000,00	105.686.147.002,00	105.686.147.002,00	100,00
Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.1	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00
Dana Desa	5.1.1.2.2.3	178.814.588.000,00	178.814.588.000,00	178.814.588.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		292.000.735.000,00	292.000.735.002,00	292.000.735.002,00	100,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.3	77.957.899.289,00	82.305.671.591,00	4.347.772.302,00	105,58
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	8.223.565.289,00	6.792.896.591,00	(1.430.668.698,00)	82,60
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2.3.2		-	-	0,00

Uraian	Indeks CALK	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Bertambah / Berkurang Rp.	%
1	2	3	4	5	6
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.3	69.734.334.000,00	75.512.775.000,00	5.778.441.000,00	108,29
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		77.957.899.289,00	82.305.671.591,00	4.347.772.302,00	105,58
Total Pendapatan Transfer		1.447.842.454.289,00	1.433.093.704.364,00	(14.748.749.925,00)	98,98
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	8.355.300.000,00	519.864.921,00	(7.835.435.079,00)	6,22
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	8.355.300.000,00	519.864.921,00	(7.835.435.079,00)	6,22
Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	0,00
Pendapatan Lainnya		-	-	-	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		8.355.300.000,00	519.864.921,00	(7.835.435.079,00)	6,22
JUMLAH PENDAPATAN		1.503.238.418.337,00	1.471.032.512.077,16	(32.205.906.259,84)	97,86

Dibawah ini disajikan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2018 (tahun berjalan), Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2017 dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018.

RENCANA KERJA OPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2019

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kabupaten Asmat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD/RENSTRA SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Semester I Tahun 2018								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Sumber Daya Aparatur dan Tertib Administrasi SKPD																						
				600%	116.077	83,94%	14.228	100	14.001	9,72%	1.550	24,76%	2.176					34,48%	3.727	118,42%	17.713	19,73%	15,26%
1.		Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi perkantoran	600%	23.550	100	4.413	100	3.660	18,37	700	21,1	980					39,47	1.681	139,47	6.094	23,245	25,88
		1.1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	600%	762	100	135	1 Tahun	50	16,7	21	25	24					41,7	46	141,7	181	23,62	23,87
		1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	600%	857	100	123	1 Tahun	102	51	53	47	49					98	102	198	225	33	26,34
		1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	600%	646	66,67	165	1 Tahun	100		-		-					0	-	66,67	165	11,11	25,67
		1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	600%	7.695	100	1.767	1 Tahun	1.738	14	259	24	426					38	686	138	2.454	23	31,9

RENCANA KERJA OPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2019

		1.5 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	6 Tahun	1.375	100	337	1 Tahun	422		-	45	196				45	196	145	533	24,17	38,83
		1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6 Tahun	1.113	100	380	1 Tahun	111	40	82	10	8				50	91	150	471	25	42,38
		1.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 Tahun	109	70	8	1 Tahun	10		-		-				0	-	70	8	11,67	7,34
		1.8 Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	105.000 Liter	2.090	100	126	1 Tahun	284		-		-				0	-	100	126	16,67	6,07
		1.9 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3990 Kotak	530	100	378	1 Tahun	214	27	59	40	125				67	184	167	563	27,83	106,38
		1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	6 Tahun	8.373	100	989	1 Tahun	626	35	223	20	150				55	373	155	1.362	25,83	16,28
2.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	600%	4.623	100	223.989	100	611	14	26.751	26,25	215				40,25	242	140,25	223	23,375	4,84
		2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	72 Unit	7.236	100	63	1 Keg	40		-	5	2				5	2	105	65	17,5	909,76
		2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	66 Unit	3.766	100	52	1 Keg	482		-	36	182				36	182	136	234	22,67	6,22
		2.3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	6 Tahun	544	100	92	1 Keg	50	34	17	40	21				74	38	174	131	29	24,25
		2.4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	6 Keg	306	100	14	1 Keg	39	22	9	24	10				46	19	146	34	24,33	11,24
3.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	600%	666	100	37	100	39	-	-	60	23				60	23	160	61	26,67	9,25
		3.1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan	Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan	18 Lap	666	100	37	3 Laporan	39		-	60	23				60	23	160	61	26,67	9,25
4.		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	600%	2.384	42,85%	31	100	80	-	-		-				-	-	42,85	31	7,14	1,31
		4.1 Penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah dan pembuatan daftar tunggakan serta pendistribusian laporan terhadap OPD terkait	Tersusunnya laporan realisasi pendapatan daerah dan pembuatan daftar tunggakan serta pendistribusian laporan terhadap OPD terkait	6 Laporan	1.069	85,7	31	12 Bulan 1 Laporan	80		-		-				0	-	85,7	31	14,17	2,92

RENCANA KERJA OPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2019

		4.2 Pemetaan dan pendataan PBB oleh KP PBB dan BPKAD di Distrik Agats	Tersedianya Data PBB Oleh KP PBB dan DPPKAD	9 Distrik	1.315	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0
B	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang profesional dan bertanggungjawab																			
5.		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah	a. Persentasi Pertumbuhan PAD dan Lain-Lain b. Katepatan Penetapan APBD c. Opini BPK	600%	84.854	83,18%	9.522	100	9.609	16,22	823	16,44	955		32,67	1.779	33,49	11.301	5,58	13,32
		5.1 Pengembangan sistem (software) PBB-P2 berbasis Sismiop pada BPKAD T.A. 2017	Tersedianya sistem (software) PBB-P2 berbasis Sismiop pada BPKAD T.A. 2017	600%	2.760	100	326		-				-		0	-	100	326	16,67	11,83
		5.2 Penyusunan standar satuan harga T.A. 2018	Tersedianya standar satuan harga T.A. 2018	600%	4.127	100	400		-		-		-		0	-	100	400	16,67	9,69
		5.3 Penyusunan Raperda APBD	Tersedianya Raperda APBD	600%	8.729	100	1.106	1 Kegiatan	2.454	7	172	16	418		23	590	123	1.696	20,5	19,44
		5.4 Penyusunan Raperda dan Perbup Perubahan APBD	Tersusnya Raperda dan Perbup Perubahan APBD	600%	4.531	100	608	1 Kegiatan	950	5	50	2	6		7	56	107	665	17,83	14,68
		5.5 Penyusunan Raperda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusnya Raperda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	600%	4.835	100	904	1 Kegiatan	935	28	276	26	263		54	540	154	1.445	25,67	29,89
		5.6 Penyusunan Raperda dan Perbup APBD tahun selanjutnya	Tersusnya Raperda dan Perbup APBD tahun selanjutnya	600%	2.799	100	894		-		-		-		0	-	100	894	16,67	31,94
		5.7 Penyusunan inventaris aset dan pemeliharaan hardware pada BPKAD T.A. 2017	tersusnya inventaris aset dan pemeliharaan hardware pada BPKAD T.A. 2017	600%	1.004	100	482		-		-		-		0	-	100	482	16,67	48,05
		5.8 Pelelangan barang milik daerah Kab. Asmat	dilakukannya Pelelangan barang milik daerah Kab. Asmat			0	12		-		-		-		0	-	0	12		
		5.9 Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah (UU, Perpres dan Permen)	dilaksanannya Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah (UU, Perpres dan Permen)	600%	20.586	66,67	12	3 Keg	1.122	26	310	22	247		48	557	114,67	570	19,11	2,77
		5.10 Pendataan aset di Merauke, Timika, Jayapura dan luar propinsi	dilaksakannya Pendataan aset di Merauke, Timika, Jayapura dan luar propinsi	600%	2.653	91,66	594		-		-		-		0	-	91,66	594	15,28	22,42

RENCANA KERJA OPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2019

		5.11 Pendaftaran dan pendataan subjek/objek pajak dan retribusi daerah dan penertiban penyampaian SKPD dan SKRD di 15 distrik dan penagihan (terpadu)	dilaksanakannya Pendaftaran dan pendataan subjek/objek pajak dan retribusi daerah dan penertiban penyampaian SKPD dan SKRD di 15 distrik dan penagihan (terpadu)	600%	11.720	81,25	569	1 Kegiatan	464	5	13	5	4					10	18	91,25	587	15,21	5,01
		5.12 Penyortiran dan penyampaian SPT PBB	dilaksanakannya Penyortiran dan penyampaian SPT PBB	600%	1.297	25	574	1 Kegiatan	824	0	-	2	16					2	16	27	590	4,5	45,56
		5.13 Pengadaan, pendampingan implementasi pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi manajemen pendapatan daerah	dilaksanakannya Pengadaan, pendampingan implementasi pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi manajemen pendapatan daerah	600%	7.195	100	147	1 Kegiatan	406	25	-	25	-					50	-	150	147	25	2,05
		Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Laporan Berbasis Akrua dan Pemeliharaan Serta Pengembangan Sistem Siadinda Akrua pada SKPD Kab Asmat	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Laporan Berbasis Akrua dan Pemeliharaan Serta Pengembangan Sistem Siadinda Akrua pada SKPD Kab Asmat	600%	12.617	100	2.887	1 Kegiatan	1.377	25	-	25	-					50	-	150	2.887	25	22,88
		Pendampingan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem (SIMAKDA) SIMKASDA dan SIMGAJI pada BPKAD Kab. Asmat	Terlaksananya Pendampingan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem (SIMAKDA) SIMKASDA dan SIMGAJI pada BPKAD Kab. Asmat					1 Kegiatan	1.073	25		25						50	-	50	-		
Predikat kinerja						83,94%												34,48					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Komitmen Aparatur dalam melaksanakan pekerjaan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana termasuk aplikasi computer																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : SDM Aparatur yang handal masih kurang																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Mengoptimalkan kinerja aparatur dan meningkatkan kualitas SDM																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*): Mengoptimalkan kinerja aparatur dan Kualitas SDM serta meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam membayar pajak dan retribusi.																							

Memperhatikan data sebagaimana tabel diatas, maka perkembangan realisasi pencapaian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional ditargetkan sebanyak 3 Unit terealisasi sebanyak 2 unit atau hanya mencapai 66,67 % ;
 - b. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ditargetkan sebanyak 10 Pengumuman Lelang, terealisasi sebanyak 7 Pengumuman lelang atau hanya mencapai 70 % ;
 - c. Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah dan Pembuatan Daftar Tunggal serta Pendistribusian Laporan terhadap OPD terkait ditargetkan sebanyak 7 Orang x 9 Hari x 12 Bulan, terealisasi sebanyak 6 Orang x 4 Hari x 12 Bulan atau mencapai 85,70 % ;
 - d. Kegiatan Pemetaan dan Pendataan PBB oleh KP PBB dan BPKAD Kabupaten Asmat di Distrik ditargetkan sebanyak 1 Distrik, terealisasi 0 atau mencapai 0 % ;
 - e. Kegiatan Pelelangan Barang Milik Daerah Kabupaten Asmat ditargetkan sebanyak 1 kegiatan, terealisasi 0 Kegiatan atau mencapai 0 % ;
 - f. Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Undang-Undang, Perpres dan Permen) ditargetkan sebanyak 6 Kegiatan, terealisasi 4 Kegiatan atau hanya mencapai 66,67 % ;
 - g. Kegiatan Pendataan Asset di Kabupaten Asmat, Merauke, Jayapura dan Luar Provinsi Papua ditargetkan sebesar 100 %, terealisasi mencapai 91,66 % ;
 - h. Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Subjek/Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Penagihan di Distrik dan Kampung ditargetkan sebanyak 8 Distrik dan 15 OPD, terealisasi 5 Distrik dan 15 OPD atau mencapai 81,25 % ;
 - i. Kegiatan Penyortiran dan Penyampaian SPPT PBB serta Monitoring Penyampaian SPPT PBB ditargetkan sebanyak 4 Distrik terealisasi sebanyak 1 Distrik atau hanya mencapai 25 %.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan ada sebagai berikut :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ditargetkan sebesar 100 %, terealisasi 100 % ;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ditargetkan sebesar 1 Tahun terealisasi sebesar 1 Tahun atau mencapai 100 % ;
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ditargetkan untuk pembayaran tenaga honorer selama 12 bulan, terealisasi 12 bulan atau mencapai 100 % ;
 - d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor ditargetkan untuk menunjang pelaksanaan tugas kantor selama 12 bulan, terealisasi 12 bulan atau mencapai 100 % ;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ditargetkan untuk menunjang tugas kantor selama 12 bulan, terealisasi 12 bulan atau mencapai 100 % ;
 - f. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor atau belanja BBM ditargetkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kantor selama 12 bulan, terealisasi 12 bulan atau mencapai 100 % ;
 - g. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman ditargetkan selama 12 bulan, terealisasi 12 bulan atau mencapai 100 % ;
 - h. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ditargetkan untuk belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah selama 12 bulan, terealisasi 12 bulan atau mencapai 100 % ;
 - i. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ditargetkan sebanyak 3 Kegiatan, terealisasi sebanyak 3 Kegiatan atau mencapai 100 % ;
 - j. Kegiatan Penyediaan Peralatan Gedung Kantor ditargetkan sebanyak 2 Unit, terealisasi 2 Unit atau mencapai 100 % ;
 - k. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor ditargetkan sebanyak 1 Unit terealisasi sebanyak 1 unit atau mencapai 100 % ;
 - l. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor ditargetkan sebanyak 1 Unit terealisasi sebanyak 1 unit atau mencapai 100 % ;
 - m. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan ditargetkan sebanyak 3 Laporan, Realisasi 3 laporan atau mencapai 100 % ;

- n. Kegiatan Pengembangan Sistem (Software) PBB-P2 Berbasis SISMIOP pada BPKAD Kabupaten Asmat ditargetkan 1 Kegiatan, realisasi 1 Kegiatan atau mencapai 100 % ;
 - o. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga ditargetkan sebanyak 1 Kegiatan, Realisasi 1 Kegiatan atau mencapai 100 % ;
 - p. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditargetkan sebanyak 1 Peraturan Daerah dan 1 Peraturan Bupati, Terealisasi 1 Peraturan Daerah dan 1 Peraturan Bupati atau mencapai 100 % ;
 - q. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditargetkan sebanyak 1 Peraturan Daerah dan 1 Peraturan Bupati, Terealisasi 1 Peraturan Daerah dan 1 Peraturan Bupati atau mencapai 100 % ;
 - r. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditargetkan sebanyak 1 Peraturan Daerah dan 1 Peraturan Bupati, Terealisasi 1 Peraturan Daerah dan 1 Peraturan Bupati atau mencapai 100 % ;
 - s. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Selanjutnya ditargetkan sebanyak 1 Peraturan Daerah dan 1 Peraturan Bupati, Terealisasi 1 Peraturan Daerah dan 1 Peraturan Bupati atau mencapai 100 % ;
 - t. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Inventarisasi Aset dan Pemeliharaan Hardware pada BPKAD ditargetkan sebanyak 1 kegiatan, realisasi 1 kegiatan atau mencapai 100 % ;
 - u. Kegiatan Pengadaan, Pendampingan Implementasi Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah ditargetkan sebanyak 1 Kegiatan, terealisasi 1 Kegiatan atau mencapai 100 % ;
 - v. Kegiatan Pendampingan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem (SIMAKDA), SIMKASDA dan SIMGAJI pada BPKAD ditargetkan sebanyak 1 Kegiatan, realisasi 1 Kegiatan atau mencapai 100 % ;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan ;

Pada Tahun 2017 tidak ada realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan pada Rencana Kerja dan Anggaran BPKAD.

4. Faktor – Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan ;

Dari beberapa realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana dijelaskan pada point 1 di atas, disebabkan karena beberapa fater sebagai berikut :

- a. Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran sebagai akibat dari tingkat kemampuan keuangan daerah serta dinamika yang berkembang ;
- b. Terjadi efesiensi belanja sebagai akibat dari ketidakpastian besaran dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan sebagai akibat dari kondisi perekonomian nasional yang tidak stabil ;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan ;
- d. Masih kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi serta berkualitas dalam melaksanakan setiap program / kegiatan yang telah direncanakan ;
- e. Kurangnya dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan Pengelolaan Aset Daerah.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategi Perangkat Daerah ;

Setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai Rencana Kerja Oganisasi Perangkat Daerah setiap tahun memberikan konsekwensi terhadap pencapaian Rencana Strategis OPD pada akhir periode.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

Atas hasil analisa factor – factor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan sebagaimana telah dijelaskan pada point 3 di atas, maka Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perlu melakukan analisa secara efektif terhadap semua proses perencanaan khususnya menentukan target capaian kinerja dengan memperhatikan tingkat kemampuan keuangan daerah serta mempertimbangkan setiap dinamika yang berkembang ;
- b. Efisiensi belanja perlu dilakukan oleh setiap OPD namun tetap memperhatikan pencapaian target yang telah ditetapkan ;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan ;
 - a. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Diklat, Seminar, BinteK, Workshop yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan/swasta ;
 - b. Meningkatkan Pembinaan serta sinkronisasi dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan Pengelolaan Aset Daerah.

Berdasarkan target realisasi pencapaian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2017, maka memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tabel Pencapaian Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan OPD	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi OPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	93,66%	93,66
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	%	45%	45%	100
			Presentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan sesuai bidangnya	%	50%	50%	100
			Cakupan pembinaan disiplin aparatur	%	100%	100%	100
			Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Kriteria	CC		
2.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Yang profesional dan bertanggungjawab	APBD Tepat Waktu	Kriteria	tepat	Tepat	100
			Opini BPK terhadap LKPD Asmat	Nilai	WTP	WTP	100 %
			Persentase Peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan	Persen	18,01	22,03%	122,32

Dari realisasi Indikator Kinerja Utama di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasarana 1 :

Meningkatnya kualitas pelayanan, sumber daya aparatur dan tertib administrasi OPD, sasaran strategis ini merupakan penunjang organisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut ;

a. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Pencapaian target indikator sasaran ini sebesar 93,66 %, disebabkan karena terealisasinya program layanan administrasi perkantoran yang meliputi :

- Kegiatan Jasa surat menyurat yang ditargetkan sebanyak 250 Surat, dan terealisasi sebanyak 250 Surat atau mencapai target 100 % ;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ditargetkan 12 bulan, teralisasi 12 bulan atau mencapai 100 % ;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional ditargetkan sebanyak 3 Unit, realisasi 2 Unit atau mencapai 66,67 %
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ditargetkan 12 bulan, realisasi 12 bulan atau mencapai 100 % ;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ditargetkan 12 bulan, terealisasi 12 bulan atau mencapai 100 % ;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan ditargetkan 100 %, terealisasi hanya mencapai 70 % ;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor ditarget sebesar 12 Bulan, terealisasi 12 bulan atau mencapai 100 %
- Penyediaan Makanan dan Minum ditargetkan untuk 12 bulan, terealisasi 12 bulan atau mencapai 100 %.

Sehingga rata – rata pencapaian program penyediaan jasa administrasi perkantoran dalam mendukung pencapaian indikator sasaran sebesar 93,66 %.

b. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana

Sesuai dengan target indikator sasaran ini sebesar 45 % dan realisasi pencapaian target sebesar 45 %. Realisasi dapat diukur dari data Inventaris

Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Asmat pe-31 Desember 2017 dan realisasi pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mencapai 100 %.

- c. Presentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan sesuai bidangnya.
- Untuk mencapai target indicator sasaran ini, maka Strategi yang dilakukan oleh BPKAD adalah Meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia aparatur dengan kebijakan Peningkatan Kemampuan Teknis Fungsional Aparatur, maka berbagai pelatihan dan sosialisasi yang telah dilakukan pada Tahun 2017 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Pengembangan SDM
Tahun 2017

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	PESERTA
1	2	3	4
1	Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa dan Laporan Keuangan	Februari 2017	OPD dan BPKAD
2	Sosialisasi Taspen	Februari 2017	OPD dan BPKAD
3	Sosialisasi Amnesty Pajak dan E-Filling	14 Maret 2017	OPD dan BPKAD
4	Sosialisasi Aplikasi E-Planning DAK	April 2017	Ibu Vero/Staf Bidang Anggaran
5	Sosialisasi PPh	Juni 2017	OPD dan BPKAD
6	Sosialisasi Penyusunan Laporan OTSUS 2017	Juni 2017	Fikram / Staf Bidang Anggaran
7	Pelatihan Perhitungan Penyusutan dan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua	17 s.d 20 Juli 2017	1. Kasubbag. Keuangan OPD 2. Bendahara Pengeluaran OPD 3. Bendahara Barang OPD 4. Operator SIADINDA dan SIMBADA 5. Staf BPKAD Kabupaten Asmat

d. Cakupan pembinaan disiplin aparatur.

Meskipun pencapaian target pembinaan disiplin aparatur tidak didukung dengan penyediaan program dan kegiatan pada DPA BPKAD Tahun Anggaran 2017, namun untuk mencapai target sebesar 100 %, maka berbagai bentuk pembinaan telah dilakukan secara berjenjang dari Kepala BPKAD kepada seluruh staf, Kepala Bidang kepada staf bidang, maupun Kepala Seksi kepada staf seksi. Bentuk pembinaan yang dilakukan berupa secara lisan pada saat rapat-rapat staf dan juga secara tertulis dalam bentuk surat maupun dituangkan dalam Keputusan Bupati yang mengatur tentang pemberian penghasilan bersyarat kepada PNS atau Non PNS, sehingga target dimaksud telah terealisasi 100 % yang dibuktikan dengan tingkat kehadiran PNS maupun kedisiplinan lain berdasarkan pantauan pimpinan.

e. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Untuk mencapai target Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja, maka kebijakan yang dilakukan oleh BPKAD adalah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu Penyusunan Pelaporan dan Pertanggung-jawaban Kinerja OPD.

Sasaran 2 :

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Yang profesional dan bertanggungjawab

a. APBD Tepat Waktu

Penyusunan dan penetapan dokumen APBD Tahun 2017 dan dokumen APBD Perubahan Tahun 2017 telah tercapai sesuai dengan target yakni tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2017.

Untuk lebih dijelas dapat dilihat pada tabel tahapan penyusunan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Tahapan Penyusunan APBD Kabupaten Asmat
Tahun Anggaran 2017

No.	Uraian	Rencana Berdasarkan Permendagri No. 31 Tahun 2016		Tanggal Realisasi di Kab. Asmat
		Waktu	Lama	
1.	Penyusunan dan pembahasan RKA-OPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang APBD	Awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September		4 November s/d. 8 November 2016
2.	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD	Minggu I bulan Oktober	2 bulan	17 November 2016
3.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan		25 November 2016
4.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama		25 November 2016
5.	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima oleh MDN/Gub		2 Desember 2016

6.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)		Desember 2016
7.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gub	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan		
8.	Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)		Perda Tanggal 9 Desember 2016 dan Perbup Tanggal 13 Desember 2016
9.	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub	Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan		16 Desember 2016

Tabel 2.7
Tahapan Penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Asmat
Tahun Anggaran 2017

No.	Uraian	Rencana Berdasarkan Permendagri No. 31 Tahun 2016		Tanggal Realisasi di Kab. Asmat
		Waktu	Lama	
1	Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-OPD, RKAPPKD dan DPPA-OPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lambat minggu I bulan September	3 minggu	Maret 2017 s/d Juli 2017
2	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September	3 minggu	4 Agustus 2017
3	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir		19 Agustus 2017

4	Menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada MDN/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama		14 Agustus 2017
5	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh MDN/Gub		24 Agustus 2017
6	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	7 hari kerja	
7	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada MDN/Gub	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan		
8	Penetapan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil Evaluasi			Perda tanggal 25 Agustus 2017 dan Perbup Tanggal 28 Agustus 2017
9	Penyampaian Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada MDN/Gub	Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan		24 Agustus 2017

b. Opini BPK terhadap LKPD Asmat

Terhadap pencapaian Indikator Sasaran ini dapat dijelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2017 telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, dan memperoleh Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga target Indikator Sasaran tercapai sebesar 100 %.

Sebagai gambaran, berikut disajikan data pencapaian Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat untuk lima tahun terakhir.

Tabel 2.8
Data Perkembangan Opini BPK RI
Terhadap LKPD Kabupaten Asmat (Tahun 2013 – 2017)

TAHUN	OPINI BPK
2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2015	Wajar Tanpa Pengecualian
2014	Wajar Tanpa Pengecualian
2013	Wajar Tanpa Pengecualian

- c. Persentase Peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Salah satu fungsi pokok dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah mengelola Pendapatan Daerah.

Kebijakan yang dilakukan oleh BPKAD untuk mencapai indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan optimalisasi pengelolaan PAD ;
2. Penggalian sumber pendapatan daerah di luar pos pendapatan konvensional ;
3. Penataan Regulasi Pendapatan Daerah ;
4. Peningkatan SDM Bidang pendapatan daerah.

Implementasi dari berbagai Kebijakan diatas sampai dengan Tahun 2017 tetap dilakukan, sehingga pencapaian target akhir pada Renstra BPKAD Tahun

2021 dapat tercapai. Berbagai upaya yang telah dilakukan adalah melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap pengelolaan objek – objek Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Asmat oleh semua OPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah yang didukung oleh berbagai regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah maupun melalui Peraturan Bupati Asmat yang mengacu pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sedangkan implementasi peningkatan SDM Bidang pendapatan daerah terus dilakukan melalui magang, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah termasuk pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).

Terhadap beberapa kebijakan dan implementasi di atas, maka pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dari Tahun ke Tahun ditargetkan mengalami peningkatan sesuai dengan Restra BPKAD Tahun 2016 – 2021.

Tabel 2.9
Persentase Target Pendapatan Asli Daerah
Dari Tahun 2016 - 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan	Persen	14,76	18,01	22,64	25,29	26,14	27,36

Berdasarkan tabel diatas, maka pada Tahun 2017 ditargetkan peningkatan PAD sebesar 18,1 % dari Tahun dasar yakni Tahun 2015, dimana pada Tahun 2015 Realisasi PAD sebesar Rp. 51.564.628.444,00, sedangkan realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2017 sebesar 37.414.072.791,76,- atau mengalami penurunan 27,44% dari Tahun 2015.

Namun penurunan realisasi PAD di atas tidak bisa dijadikan sebagai dasar pencapaian target indikator sasaran Persentase Peningkatan PAD sebagai

sumber pembiayaan pembangunan, hal ini disebabkan karena terjadi perubahan penempatan target pendapatan dari Pendapatan Asli daerah ke Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah seperti :

- Kartu Papua Sehat sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- Prospek Provinsi Papua sebesar Rp. 17.234.334.000,-

Dengan kata lain penurunan realisasi penerimaan daerah pada Tahun 2017 juga disebabkan karena perubahan regulasi yang mengatur tentang penempatan pos-pos pendapatan dalam APBD.

Sehingga, guna mengukur capaian target indikator dimaksud, maka dimungkinkan untuk disesuaikan dengan komponen-komponen penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2015, maka realisasi penerimaan pada tahun 2017 dapat disajikan sebagai berikut :

1. PAD	Rp.	37.414.072.791,76
2. Kartu Papua Sehat	Rp.	3.528.800.000,00
3. PROSPEK	Rp.	21.983.975.000,00
Jumlah	Rp.	62.926.847.791.76

Atas penjelasan di atas, maka capaian target indikator sasaran tahun 2017 adalah sebesar 22,03 %. Ini menunjukkan terjadi kelebihan pencapaian target sebesar 4,02 % dari Target sebesar 18.01 %.

Namun demikian, pencapaian target PAD secara keseluruhan belum dicapai secara optimal, karena terdapat beberapa target pada komponen penerimaan daerah yang tidak tercapai diantaranya :

1. Target Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan realisasi 0 % dari target sebesar Rp. 7.181.492.131,-
2. Target Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah hanya tercapai 89 % dari Target sebesar Rp. 31.320.885.917,-

Tabel 2.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	
						2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan OPD	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi OPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	93,66%
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	%	40%	40%	45%
			Presentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan sesuai bidangnya	%	50%	50%	50%
			Cakupan pembinaan disiplin aparatur	%	100%	100%	100%
			Nilai akuntabilitas kinerja OPD	%	C	100%	
2.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Yang profesional dan bertanggungjawab	APBD Tepat Waktu	Kriteria	tepat	Tepat	Tepat
			Opini BPK terhadap LKPD Asmat	Nilai	WTP	WTP	WTP
			Persentase Peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan	Persen	14,76	38,36%	22,03%

Tabel 2.11

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD / Renstra

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		
					2017		2021
					Target	Realisasi	
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan OPD	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi OPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	93,67%	100%
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	%	45%	45%	60%
			Presentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan sesuai bidangnya	%	50%	50%	100%
			Cakupan pembinaan disiplin aparatur	%	100%	100%	100%
			Nilai akuntabilitas kinerja OPD	%	CC		A
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Yang profesional dan bertanggungjawab	APBD Tepat Waktu	Kriteria	tepat	100%	Tepat
			Opini BPK terhadap LKPD Asmat	Nilai	WTP	WTP	WTP
			Persentase Peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan	Persen	18,01	22,03	27,36

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD / Renstra terdapat tingkat kemajuan pada sasaran strategis pembinaan disiplin aparatur yang telah mencapai 100 % dan Opini terhadap LKPD Asmat yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dari uraian evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 disimpulkan bahwa sebagian besar program yang telah dilaksanakan tidak ada hambatan yang besar.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran / target rencana kerja periode sebelumnya yakni Tahun 2017 dapat disimpulkan kinerja yang dihasilkan dapat tercapai 83,18%. Secara lengkap dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			100 %	100 %	100 %	100%	93,67%				
	Persentasi Pertumbuhan Pelayanan PAD			18,01%	22,64%	130%	135,00%	22,03%				
	Cakupan Tertib Administrasi Pendapatan			100%	100%	100%	100%	100				
	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP				
	APBD Tepat Waktu			Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat				

RENCANA KERJA OPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2019

Indikator Kinerja (outcome/Output)	SPM	IKK	Target Renstra OPD		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
			Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran			2000 Surat	2000 Surat	2000 Surat		
Jumlah sarpras yang berfungsi baik			98 Jenis	98 Jenis	98 Jenis		
Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek			75 Orang	75 Orang	75 Orang		
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		
Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan			7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan		
Jumlah rancangan Perda APBD untuk tahun n+1			1 Perda	1 Perda	1 Perda		
Jumlah rancangan Perjabaran Perda APBD untuk tahun n+1			1 Perda	1 Perda	1 Perda		
Jumlah Perda Perubahan APBD			1 Perda	1 Perda	1 Perda		
Jumlah Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD			1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup		
Jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terpelihara			5 Sistem Aplikasi	5 Sistem Aplikasi	5 Sistem Aplikasi		
Asistensi verifikasi RKA, DPA dan DPPA			27 OPD	27 OPD	27 OPD		
Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun			2 Dok	2 Dok	2 Dok		
Pengelolaan keuangan PPKD							
Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan			1.106	1.106	1.106		
Jumlah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan			3.625	3.625	3.625		
Jumlah Karcis Pasar			288	288	288		

RENCANA KERJA OPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2019

Jumlah SPD yang diterbitkan			2250 SPD	2250 SPD	2250 SPD		
Jumlah jenis sosialisasi dan jumlah peserta sosialisasi			5 Keg 1250 Orang	5 Keg 1250 Orang	5 Keg 1250 Orang		
Jumlah perda dan perbup pertanggung jawaban pelaksanaan APBD			1 Perda 1 Perbup	1 Perda 1 Perbup	1 Perda 1 Perbup		
Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi dan yang dimonev			26 OPD	26 OPD	26 OPD		
Jumlah perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah yang diterbitkan			2 Perbup	2 Perbup	2 Perbup		
Jumlah peserta sosialisasi perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah			250 Orang	250 Orang	250 Orang		
Jumlah pedoman pelaksanaan APBD dan jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan			1 Perbup 250 Orang	1 Perbup 250 Orang	1 Perbup 250 Orang		
Jumlah SP2D yang diterbitkan			6.308 SP2D	6.308 SP2D	6.308 SP2D		

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD selaku OPD maupun SKPKD.

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD diantaranya adalah keterbatasan sarana prasarana aparatur, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran yang ada. Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kabupaten Asmat dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT :

1. Strength (Kekuatan)

- 1) Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 2) Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi OPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat.
- 3) Melaksanakan pembinaan kepada OPD melalui fungsi evaluasi perencanaan anggaran, evaluasi penerimaan daerah, dan pengelolaan keuangan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran.

2. Weaknes (Kelemahan)

- 1) Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah yang ditandai dengan belum Optimalinya kontribusi PAD;
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
- 3) Belum optimalnya Penataan Aset Daerah;
- 4) Belum terbangunnya unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah;

3. Opportunity (Peluang)

- 1) Adanya komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Asmat, penerapan e-planning (e-government) serta kemudahan perijinan melalui system satu atap pada Bagian Perijinan dan Penanaman Modal Setda Kabupaten Asmat.
- 2) Adanya diklat, seminar, bintek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta.
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- 4) Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi dengan tingkat provinsi dan pusat.

4. Treath (Ancaman)

- 1) Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat.
- 2) Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan program kegiatan dengan dokumen perencanaan dan dinamika yang berkembang.
- 3) Masih kurangnya kompetensi dan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap OPD.
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
- 5) Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.
- 6) Ketidakpastian besaran dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan sebagai akibat dari kondisi perekonomian nasional yang tidak stabil.

Perumusan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan oleh BPKAD Kabupaten Asmat diantaranya :

1. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

2. penerapan laporan keuangan daerah dengan sistem akuntansi berbasis akrual.
3. Pelayanan pengelolaan kas daerah dan gaji PNSD berbasis teknologi informasi.
4. Pengembangan sistem aplikasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima.
6. Peningkatan profesionalisme aparatur dan pemenuhan SDM yang handal sesuai tuntutan kebutuhan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.13
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

NO	KODE REKENING	PROGRAM/PROYEK/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL			HASIL ANALISA KABUTUHAN			KET
			LOKASI KAMPUNG/DISTRITK	SASARAN & TARGET	JUMLAH DANA	LOKASI KAMPUNG/DISTRITK	SASARAN & TARGET	JUMLAH DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							
1	1.20.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Agats	BPKAD - Materai 2000 Lbr - Biaya Pengiriman 2000 Kg	50.000.000,00	Agats	BPKAD - Materai 2000 Lbr - Biaya Pengiriman 2000 Kg	50.000.000,00	
2	1.20.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Agats	BPKAD - Biaya Voucher Listrik 12 Bulan - Air Mineral 282 Dos	102.998.887,68	Agats	BPKAD - Biaya Voucher Listrik 12 Bulan - Air Mineral 282 Dos	124.077.500,00	
3	1.20.05.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Agats	BPKAD - Mobil 1 Unit - STNK 43 Buah	100.387.784,50	Agats	BPKAD - Mobil 1 Unit - STNK 43 Buah	68.769.000,00	

RENCANA KERJA OPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2019

4	1.20.05.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Agats	BPKAD - Honor Kasda 3 Orang - Honor Harian 45 Orang	1.738.800.000,00	Agats	BPKAD - Honor Kasda 3 Orang - Honor Harian 45 Orang	1.638.900.000,00	
5	1.20.05.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Agats	BPKAD - 23 Jenis	422.311.944,06	Agats	BPKAD - 23 Jenis	424.997.000,00	
6	1.20.05.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Agats	BPKAD - Cetak 1 Tahun - Peggandaan 160.000 Lbr dan 550 Buku	111.597.125,00	Agats	BPKAD - Cetak 1 Tahun - Peggandaan 160.000 Lbr dan 550 Buku	117.400.000,00	
7	1.20.05.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Agats	BPKAD 1 Tahun	10.000.000,00	Agats	BPKAD 1 Tahun	10.000.000,00	
8	1.20.05.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Agats	BPKAD - Solar 15000 Liter - Oli 50 Klg	284.054.800,00	Agats	BPKAD - Solar 15000 Liter - Oli 50 Klg	284.054.800,00	
9	1.20.05.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Agats	BPKAD - Makan 1500 Kotak - Snack 776 Kotak	214.015.000,00	Agats	BPKAD - Makan 1500 Kotak - Snack 776 Kotak	214.015.000,00	
10	1.20.05.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Agats	BPKAD - Dalam Daerah 12 Kali - Luar Daerah 16 Kali	626.200.000,00	Agats	BPKAD - Dalam Daerah 12 Kali - Luar Daerah 16 Kali	541.916.000,00	
II		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							

RENCANA KERJA OPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2019

11	1.20.05.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Agats	BPKAD - 1 Keg	40.000.000,00	Agats	BPKAD - 1 Keg	40.690.000,00	
12	1.20.05.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Agats	BPKAD - 4 Jenis Barang	482.462.960,22	Agats	BPKAD - 4 Jenis Barang	195.974.000,00	
13	1.20.05.02.26	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Agats	BPKAD - 1 Tahun	100.000.000,00	Agats	BPKAD - 1 Tahun	132.987.000,00	
14	1.20.05.02.29	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Agats	BPKAD - Mesin 1 Unit - Komputer 10 Unit - Printer 20 Unit	40.000.000,00	Agats	BPKAD - Mesin 1 Unit - Komputer 10 Unit - Printer 20 Unit	0,00	
III		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							
15	1.20.05.06.04	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Agats	BPKAD - 2 Laporan	50.000.000,00	Agats	BPKAD - 2 Laporan	51.376.600,00	
16	1.20.05.06.04	Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah dan Pembuatan Daftar Tunggakan Serta Pendistribusian Laporan Terhadap SKPD Terkait	Agats	BPKAD - 12 Bulan dan 15 OPD	80.359.452,00	Agats	BPKAD - 12 Bulan dan 15 OPD	82.433.000,00	
IV		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
17	1.20.05.17.04	Penyusunan Standarisasi Harga Barang Kabupaten Asmat				Agats	BPKAD 1 Perbup	195.414.000,00	

RENCANA KERJA OPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2019

18	1.20.05.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD	Agats - Jayaura - Jakarta	BPKAD - 1 Perda - 1 Perbup - 29 DPA - OPD	2.500.000.000,00	Agats - Jayaura - Jakarta	BPKAD - 1 Perda - 1 Perbup - 29 DPA - OPD	1.021.754.000,00	
19	1.20.05.17.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Perubahan APBD	Agats - Jayaura - Jakarta	BPKAD - 1 Perda - 1 Perbup - 29 DPPA - OPD	1.000.000.000,00	Agats - Jayaura - Jakarta	BPKAD - 1 Perda - 1 Perbup - 29 DPPA - OPD	647.711.000,00	
20	1.20.05.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Agats - Jayaura - Jakarta	BPKAD - 1 Perda - 1 Perbup	1.000.000.000,00	Agats - Jayaura - Jakarta	BPKAD - 1 Perda - 1 Perbup	822.334.000,00	
21	1.20.05.17.16	Pendataan, Penilaian Dan Penghaspusan Aset Pemda Kabupaten Asmat	Kabupaten Asmat	BPKAD - 1 Keg	550.000.000,00	Kabupaten Asmat	BPKAD - 1 Keg	613.544.000,00	
22	1.20.05.17.17	Sensus dan pemasangan plat nomor barang dan pengecekan KIR seluruh SKPD	Kabupaten Asmat	BPKAD - 1 Keg	275.000.000,00	Kabupaten Asmat	BPKAD - 1 Keg	0,00	
23	1.20.05.17.18	Pendampingan Penyusunan Inventarisasi Aset dan Pemeliharaan Hardware pada BPKAD				Agats	BPKAD 1 Keg	515.689.200,00	
24	1.20.05.17.31	Pelelangan Barang Milik Daerah				Agats	- 1 Keg	316.385.000,00	
25	1.20.05.17.34	Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Undang - Undang, Perpres Dan Permen)	Agats	BPKAD - 3 Keg	1.122.290.855,00	Agats	BPKAD - 3 Keg	669.767.000,00	
26	1.20.05.17.35	Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah kepada Para Bendahara OPD	Agats	BPKAD - 27 OPD		Agats	BPKAD - 27 OPD		

**RENCANA KERJA OPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2019**

27	1.20.05.17.36	Pengembangan Sistem dan Kelembagaan Keluarga Emas dan Kelauga Sejahtera	Kabupaten Asmat	BPKAD - 23 Distrik	2.364.322.150,00	Kabupaten Asmat	BPKAD - 23 Distrik	347.294.000,00	
28	1.20.05.17.55	Pendaftaran dan Pendataan Subjek/Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Penerbitan Penyampaian SKPD dan SKRD ke 6 Distrik dan Penagihan (Terpadu)	Kabupaten Asmat	BPKAD - 6 Distrik	464.514.468,69	Kabupaten Asmat	BPKAD - 6 Distrik	330.390.000,00	
29	1.20.05.17.57	Penyortiran dan penyampaian SPPT PBB serta monitoring penyampaian SPPT PBB	Kabupaten Asmat	BPKAD - 1 Keg	825.000.000,00	Kabupaten Asmat	BPKAD - 1 Keg	869.245.000,00	
30	1.20.05.17.59	Pendampingan dan Pengembangan Sistem Informasi Dinas Daerah Berbasis Akrua pada 27 OPD	Agats	BPKAD - 27 OPD	1.377.235.200,00	Agats	BPKAD - 27 OPD	1.364.235.200,00	
31	1.20.05.17.61	Pendampingan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem (SIMAKDA, SIMKASDA, SIMGAJI) pada BPKAD	Agats	BPKAD - 1 Tahun	1.073.857.284,00	Agats	BPKAD - 1 Tahun	602.881.200,00	
32	1.20.05.17.63	Pengembangan Sistem (Software) Pendapatan Daerah pada BPKAD Tahun Anggaran 2019	Agats	BPKAD - 1 Tahun	406.856.800,00	Agats	BPKAD - 1 Tahun	376.856.800,00	
33	1.20.05.17.73	Penyediaan Sertifikat Tanah di Kabupaten Asmat				Kabupaten Asmat	1 Keg	328.909.700,00	
		JUMLAH			17.412.264.711,00			13.000.000.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2019 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas sebagai unsur penunjang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Asmat menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Program Nawacita dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Identifikasi Kebijakan Nasional sebagai berikut :

1. Kepastian dan Penegakan Hukum APBN
2. Keamanan dan Ketertiban APBN
3. Politik dan Demokrasi APBN
4. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi APBN

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Asmat, maka dalam menyusun program kegiatannya BPKAD mengacu pada kebijakan nasional “Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi”, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2019.

3.2. Tujuan, Target dan Sasaran Renja – OPD

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan. Peran BPKAD Kabupaten Asmat berkontribusi atas pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Asmat tahun 2016-2021. Kontribusi dimaksud tertuang dalam misi pertama Kabupaten Asmat periode tahun 2016-2021 yakni : “Membangun birokrasi bersih, responsif, transparan dan akuntabel”

Dalam kerangka mencapai misi pertama pembangunan daerah, yaitu; **Membangun birokrasi bersih, responsif, transparan dan akuntabel** maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat berupa :

- a. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Asmat.
- b. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Yang profesional dan bertanggungjawab.
- c. Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Asmat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat yang diharapkan, maka dirumuskan visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat yaitu : “ Peningkatan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efisien, Efektif, Tertib Serta Transparan ”. Makna dari visi ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat berupaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli

daerah dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan yang ada dengan tidak melanggar norma adat, etika dan lingkungan serta tidak membebani masyarakat. Dalam proses kelancaran pengelolaan keuangan dan aset daerah dibutuhkan hasil yang efisien, efektif, tertib serta transparan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah dan sumber penerimaan lain.
2. Menyelenggarakan tata pembukuan dan pelaporan serta evaluasi pajak dan retribusi daerah.
3. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, tertib serta transparan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor dalam mendukung manajemen pengelolaan keuangan daerah.
5. Menyediakan dan meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur yang profesional.

3.2.2. Target

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan target yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yakni tahun 2016-2021 yang merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya.
2. Meningkatnya sistem pembukuan dan pelaporan serta evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efisien, efektif, tertib, dan transparan.
4. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor.
5. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme aparatur.

3.2.3. Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima (5) tahun yakni tahun 2016-2021 telah ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya.
2. Sistem pembukuan dan pelaporan serta evaluasi pajak dan retribusi daerah.
3. Kelancaran pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efisien, efektif, tertib dan transparan.
4. Sarana dan prasarana kantor dalam mendukung manajemen pengelolaan keuangan daerah.
5. Peningkatan kinerja aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat.

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor – Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD / Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD / Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Asmat dalam menyusun program mempertimbangkan pencapaian tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi :

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya.
2. Meningkatkan penyelenggaraan sistem pembukuan dan pelaporan serta evaluasi pajak dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan kelancaran pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efisien, efektif, tertib dan transparan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor dalam mendukung manajemen pengelolaan keuangan daerah.
5. Meningkatkan kinerja aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh OPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

b. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Secara keseluruhan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Restra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 – 2021 yakni sebanyak 4 Program dan 30 Kegiatan dengan fokus kegiatan lebih banyak dilaksanakan di Agats karena bersifat sebagai program dan kegiatan rutin kecuali beberapa kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat berupa kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta kegiatan Pengembangan Sistem dan Kelembagaan Keluarga Emas dan Kelaurga Sejahtera yang dilaksanakan pada semua Distrik se-Kabupaten Asmat.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat pada Tahun 2019 direncanakan kebutuhan dana / pagu indikatif untuk belanja sebesar Rp. 436.588.591.183,-. Yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	423.588.591.183,-
Belanja Pegawai	Rp.	14.369.017.483,-
Belanja Subsidi	Rp.	2.800.000.000,-
Belanja Hibah	Rp.	27.000.000.000,-
Belanja Bantuan Sosial	Rp.	36.000.000.000,-
Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintahan	Rp.	342.060.912.500,-
Belanja Bantuan kepada Partai Politik	Rp.	858.661.200,-
Belanja tidak terduga	Rp.	500.000.000,-
b. Belanja Langsung	Rp.	13.000.000.000,-

Total pagu indikatif sebagaimana diatas bersumber dari 2 (dua) sumber yakni sumber dana DAU dan OTSUS dengan rincian sebagai berikut :

1. Sumber Dana DAU	Rp.	429.981.059.069,-
2. Sumber Dana OTSUS	Rp.	6.607.532.114,-

Sedangkan kesesuaian rumusan program dan kegiatan pada rancangan awal RKPD tidak mengalami perubahan kecuali pagu indikatif yang mengalami perubahan karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2019.

**RENCANA KERJA OPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2019**

Berikut ini disajikan rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat.

Tabel 3.1

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2010

NO	KODE REKENING	PROGRAM/PROYEK/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL				KET
			LOKASI KAMPUNG/DISTRIK	SASARAN & TARGET	JUMLAH ANGGARAN		
					TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
I		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
1	1.20.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Agats	BPKAD - Materai 2000 Lbr - Biaya Pengiriman 2000 Kg	50.000.000,00	55.000.000,00	
2	1.20.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Agats	BPKAD - Biaya Voucher Listrik 12 Bulan - Air Mineral 282 Dos	102.998.887,68	136.485.250,00	
3	1.20.05.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Agats	BPKAD - Mobil 1 Unit - STNK 43 Buah	68.769.000,00	75.645.900,00	
4	1.20.05.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Agats	BPKAD - Honor Kasda 3 Orang - Honor Harian 45 Orang	1.546.500.000,00	1.802.790.000,00	

RENCANA KERJA OPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2019

5	1.20.05.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Agats	BPKAD - 23 Jenis	397.229.919,00	467.496.700,00	
6	1.20.05.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Agats	BPKAD - Cetak 1 Tahun - Peggandaan 160.000 Lbr dan 550 Buku	198.178.000,00	129.140.000,00	
7	1.20.05.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Agats	BPKAD 1 Tahun	10.000.000,00	11.000.000,00	
8	1.20.05.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Agats	BPKAD - Solar 15000 Liter - Oli 50 Klg	284.554.800,00	312.460.280,00	
9	1.20.05.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Agats	BPKAD - Makan 1500 Kotak - Snack 776 Kotak	201.015.000,00	235.416.500,00	
10	1.20.05.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Agats	BPKAD - Dalam Daerah 12 Kali - Luar Daerah 16 Kali	572.631.000,00	596.107.600,00	
II		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
11	1.20.05.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Agats	BPKAD - 1 Keg	25.690.000,00	44.759.000,00	
12	1.20.05.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Agats	BPKAD - 4 Jenis Barang	243.680.400,00	285.571.400,00	
13	1.20.05.02.26	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Agats	BPKAD - 1 Tahun	44.000.000,00	46.285.700,00	
14	1.20.05.02.28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Agats	BPKAD - 1 Tahun	140.980.500,00	146.280.700,00	

RENCANA KERJA OPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2019

III		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
15	1.20.05.06.04	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Agats	BPKAD - 2 Laporan	51.184.000,00	56.514.260,00	
16	1.20.05.06.04	Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah dan Pembuatan Daftar Tunggakan Serta Pendistribusian Laporan Terhadap SKPD Terkait	Agats	BPKAD - 12 Bulan dan 15 OPD	82.361.000,00	90.676.300,00	
IV		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
17	1.20.05.17.04	Penyusunan Standarisasi Harga Barang Kabupaten Asmat	Agats	BPKAD 1 Perbup	220.364.000,00	244.955.400,00	
18	1.20.05.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD	Agats - Jayapura - Jakarta	BPKAD - 1 Perda - 1 Perbup - 29 DPA - OPD	1.217.517.000,00	1.323.929.400,00	
19	1.20.05.17.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Perubahan APBD	Agats - Jayapura - Jakarta	BPKAD - 1 Perda - 1 Perbup - 29 DPPA - OPD	857.797.000,00	912.482.100,00	
20	1.20.05.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Agats - Jayapura - Jakarta	BPKAD - 1 Perda - 1 Perbup	963.810.000,00	984.567.400,00	
21	1.20.05.17.18	Pendampingan Penyusunan Inventarisasi Aset dan Pemeliharaan Hardware pada BPKAD	Agats	BPKAD 1 Keg	515.689.200,00	567.258.120,00	
22	1.20.05.17.31	Pelelangan Barang Milik Daerah	Agats	BPKAD 1 Keg	324.235.000,00	364.235.000,00	

**RENCANA KERJA OPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2019**

23	1.20.05.17.34	Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Undang - Undang, Perpres Dan Permen)	Agats	BPKAD - 5 Keg	889.293.000,00	936.743.700,00	
24	1.20.05.17.36	Pengembangan Sistem dan Kelembagaan Keluarga Emas dan Kelaurga Sejahtera	Kabupaten Asmat	BPKAD - 23 Distrik	347.063.000,00	214.340.170,00	
25	1.20.05.17.55	Pendaftaran dan Pendataan Subjek/Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Penerbitan Penyampaian SKPD dan SKRD ke 6 Distrik dan Penagihan (Terpadu)	Kabupaten Asmat	BPKAD - 6 Distrik	229.020.000,00	363.429.000,00	
26	1.20.05.17.57	Penyortiran dan penyampaian SPPT PBB serta monitoring penyampaian SPPT PBB	Kabupaten Asmat	BPKAD - 1 Keg	709.150.000,00	956.169.500,00	
27	1.20.05.17.59	Pendampingan dan Pengembangan Sistem Informasi Dinas Daerah Berbasis Akrual pada 27 OPD	Agats	BPKAD - 27 OPD	1.364.235.200,00	1.500.658.720,00	
28	1.20.05.17.61	Pendampingan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem (SIMAKDA, SIMKASDA, SIMGAJI) pada BPKAD	Agats	BPKAD - 1 Tahun	602.881.200,00	663.169.320,00	
29	1.20.05.17.63	Pengembangan Sistem (Software) Pendapatan Daerah pada BPKAD Tahun Anggaran 2019	Agats	BPKAD - 1 Tahun	336.927.100,00	414.542.480,00	
30	1.20.05.17.69	Pendataan, Penilaian dan Penghapusan Aset Pemda Kabupaten Asmat	Kabupaten Asmat	1 Keg	402.245.793,32	361.890.100,00	
	JUMLAH				13.000.000.000,00	14.300.000.000,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah dilakukan kajian dan analisis terhadap berbagai isu-isu strategis, permasalahan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, maka dapat dirumuskan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2019 dengan rincian Program dan Kegiatan serta sumber pendanaan sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Rencana Kerja dan Sumber Pendanaan Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Ket
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	423.588.591.183	
1.20.05.TL.01	Belanja Pegawai		
	- Gaji dan Tunjangan	5.594.287.457,00	
	- Tambahan Penghasilan PNS	8.774.730.026,00	
	Belanja Subsidi	2.800.000.000,00	
	Belanja Hibah		
	- Hibah kepada Lembaga/Organisasi Profesi/Yayasan	25.000.000.000,00	
	- Hibah kepada KPUD	1.500.000.000,00	
	- Hibah Kepada Bawaslu	500.000.000,00	
	Belanja Bantuan Sosial		
	- Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Terencana	15.000.000.000,00	
	- Belanja Bantuan Studi DAU	14.392.467.886,00	
	- Belanja Bantuan Studi OTSUS	6.607.532.114,00	
	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan	342.060.912.500,00	
	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	858.661.200,00	
	Belanja tidak terduga	500.000.000,00	
	BELANJA LANGSUNG	13.000.000.000,00	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		
1.20.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000,00	
1.20.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.998.887,68	
1.20.05.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	68.769.000,00	
1.20.05.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.546.500.000,00	

1.20.05.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	397.229.919,00	
1.20.05.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	198.178.000,00	
1.20.05.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	
1.20.05.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	284.554.800,00	
1.20.05.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	201.015.000,00	
1.20.05.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	572.631.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
1.20.05.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.690.000,00	
1.20.05.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	243.680.400,00	
1.20.05.02.26	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	44.000.000,00	
1.20.05.02.28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	140.980.500,00	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		
1.20.05.06.04	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	51.184.000,00	
1.20.05.06.04	Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah dan Pembuatan Daftar Tunggakan Serta Pendistribusian Laporan Terhadap SKPD Terkait	82.361.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
1.20.05.17.04	Penyusunan Standarisasi Harga Barang Kabupaten Asmat	220.364.000,00	
1.20.05.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD	1.217.517.000,00	
1.20.05.17.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Perubahan APBD	857.797.000,00	
1.20.05.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	963.810.000,00	
1.20.05.17.18	Pendampingan Penyusunan Inventarisasi Aset dan Pemeliharaan Hardware pada BPKAD	515.689.200,00	
1.20.05.17.31	Pelelangan Barang Milik Daerah	324.235.000,00	
1.20.05.17.34	Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Undang - Undang, Perpres Dan Permen)	889.293.000,00	
1.20.05.17.36	Pengembangan Sistem dan Kelembagaan Keluarga Emas dan Keluarga Sejahtera	347.063.000,00	
1.20.05.17.55	Pendaftaran dan Pendataan Subjek/Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Penerbitan Penyampaian SKPD dan SKRD ke 6 Distrik dan Penagihan (Terpadu)	229.020.000,00	
1.20.05.17.57	Penyortiran dan penyampaian SPPT PBB serta monitoring penyampaian SPPT PBB	709.150.000,00	
1.20.05.17.59	Pendampingan dan Pengembangan Sistem Informasi Dinas Daerah Berbasis Akrua pada 27 OPD	1.364.235.200,00	
1.20.05.17.61	Pendampingan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem (SIMAKDA, SIMKASDA, SIMGAJI) pada BPKAD	602.881.200,00	
1.20.05.17.63	Pengembangan Sistem (Software) Pendapatan Daerah pada BPKAD Tahun Anggaran 2019	336.927.100,00	
1.20.05.17.69	Pendataan, Penilaian dan Penghapusan Aset Pemda Kabupaten Asmat	402.245.793,32	
JUMLAH		13.000.000.000,00	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati Asmat terpilih periode 2016-2021 yaitu TERWUJUDNYA MASYARAKAT ASMAT YANG MAJU SEJAHTERA DAN BERMARTABAT. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.
2. Dengan dokumen renja ini diharapkan dapat direncanakan berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi utamanya dalam pengelolaan keuangan dan aset dimana saat ini penerapan laporan keuangan berbasis akrual dan penerapan teknologi informasi dalam yakni diterapkannya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi OPD diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Asmat maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Agats, 28 September 2018

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kab. Asmat,**

HALASSON F. SINURAT, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19820324 19912 1 001